

ANALISIS AKUNTABILITAS PELAPORAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018-2023 NAGARI PARAMBAHAN KAB. TANAH DATAR

Rafni Dewi
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
1rafnidewi66@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine whether the implementation of accountability reporting on the development of Nagari Parambahan for 2018-2023 follows the indicators based on Minister of Home Affairs Regulation No. 114 of 2014. This research uses field research with a qualitative approach. This research shows that the Nagari Parambahan RPJM has yet to be 100% realized due to limited funds due to the non-disbursement of central government funds and COVID-19. The funds primarily used for the development of Nagari Parambahan are Nagari Fund Allocation (ADN); after that comes APBD funds. The Nagari Parambahan government always conveys the realization of RPJM and APB Nagari Parambahan on time. The sub-district team constantly evaluates all activities within its work program. It is also continually audited by Tim Tanah Datar Regency Inspectorate regarding the realization of the RPJM and APB Nagari. Nagari Parambahan Government Transparency was carried out manually, as evidenced by the erection of billboards in the Wali Nagari Parambahan yard as information to the public on the report on the realization of the use of the budget for the work program during the year. After being discussed, only four indicators met and followed the indicators Minister of Home Affairs Regulation No. 114 of 2014 covers document completeness, procedural compliance, periodic submissions, audits, and evaluations. Meanwhile, two indicators do not meet and do not match the indicators Minister of Home Affairs Regulation No. 114 of 2014 covers the suitability of reporting, transparency, and participation.

Keywords: Accountability, Reporting, Development.

ABSTRAK

Penelitian ini hendak mengkaji pelaksanaan akuntabilitas pelaporan pembangunan Nagari Parambahan tahun 2018-2023 telah sesuai atau belum dengan indikator Permendagri No 114 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini ialah RPJM Nagari Parambahan belum 100% terealisasi karena adanya keterbatasan dana dengan tidak cairnya dana pemerintah pusat, serta terjadinya Covid-19. Dana yang banyak digunakan untuk pembangunan Nagari Parambahan ialah dana Alokasi Dana Nagari (ADN), setelah itu baru dana APBD. Pemerintah Nagari Parambahan selalu tepat waktu menyampaikan realisasi RPJM dan APB Nagari Parambahan. Tim kecamatan selalu melakukan evaluasi atas segala kegiatan

yang menjadi program kerjanya, serta juga selalu di audit oleh tim Inspektorat Kabupaten Tanah Datar mengenai realisasi RPJM serta APB Nagari. Pemerintah Nagari Parambahan transparansi masih dilakukan manual dengan dibuktikan pendirian baliho di halaman Wali Nagari Parambahan sebagai informasi kepada masyarakat atas laporan realisasi penggunaan anggaran atas program kerja selama setahun. Setelah dibahas, hanya empat indikator yang memenuhi dan sesuai dengan indikator Permendagri No 114 Tahun 2014 meliputi, kelengkapan dokumen, kepatuhan prosedur, penyampaian berkala, serta audit dan evaluasi. Sedangkan dua indikator tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan indikator Permendagri No 114 Tahun 2014 meliputi, kesesuaian pelaporan, serta transparansi dan partisipasi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pelaporan, Pembangunan.

A. Pendahuluan

Fondasi perekonomian negara, percepatan pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan daerah semuanya diletakkan oleh desa (Nagari di Sumatera Barat). Saat ini, Nagari berkembang dengan pesat, dan fasilitas kota menjadikannya lokasi yang menarik untuk mencari penghidupan. Jika Pemerintah Nagari serius dalam meningkatkan perekonomian, maka harus menyusun strategi yang mempertimbangkan perbaikan fisik dan non fisik. Konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur mencakup hal-hal seperti jalan, sistem irigasi, pusat transportasi, pembangkit listrik, saluran telepon, sekolah, rumah sakit, dan banyak lagi. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang

seperti agama, pendidikan, masyarakat, dan kesehatan adalah dua contoh kegiatan non-infrastruktur yang dapat dikembangkan oleh Nagari. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan yang komprehensif sangatlah penting. Komponen infrastruktur dan non-infrastruktur membentuk pembangunan Nagari. RPJM dan RKP merupakan rencana kerja Pemerintah Nagari yang memuat rencana pembangunan. Pembangunan yang tepat sasaran merupakan hasil pembangunan yang terencana (Oktavia & Desmiwerita, 2023). Agar masyarakat Nagari sejahtera secara ekonomi, pemerintah harus berhati-hati dan adil dalam menentukan rencana pembangunan, terutama dalam membagi program ke dalam kategori prioritas dan non-prioritas.

Menjadi penyelenggara pemerintahan berarti menjadi bagian dari pemerintahan Nagari. Nagari mempunyai kewenangan mengawasi dan mengendalikan kepentingan masyarakat karena statusnya sebagai salah satu komponen sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Nagari adalah menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan perintah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Setiap bagian hukum, termasuk kewajiban di akhirat, tunduk pada amanat ini. Pemerintahan yang baik menurut Islam harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepercayaan.

Tanggung jawab merupakan perintah dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam Q.S. ayat 58. An-Nisa yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S .4 : 58)

Dengan adanya berbagai regulasi yang mengatur tentang persoalan perencanaan pembangunan, maka sudah seharusnya seluruh desa di Indonesia wajib menyusun RPJMDes

tidak terkecuali di Nagari Parambahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nagari Parambahan merupakan rencana strategis desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes Nagari Parambahan harus menyesuaikan dokumen RPJM Daerah Kabupaten Tanah Datar, dengan harapan sinergi perencanaan dapat mempercepat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nagari Pasia Laweh ini adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk waktu 6 (enam) tahun yang melekat pada masa jabatan Kepala Desa, untuk memberikan arahan sekaligus acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai visi misi dan arah kebijakan pembangunan. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan akan bersifat sinergis satu dengan lainnya, baik diantara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, maupun Pemerintah Pusat. Hal ini agar bisa mengoptimalkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dari survey awal peneliti menemukan beberapa fenomena terkait dengan realisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ini yakni sebagai berikut :

1) Ditemukan sebagian besar masih banyak Rencana Pembangunan yang tidak terlaksana. 2) Ada beberapa Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nagari yang sifatnya prioritas masih belum terealisasi. Hal ini pada umumnya terdiri dari Rencana Pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBN seperti Pembukaan Jalan ke Kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar. 3) Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari Parambahan tahun 2022, masih ada rencana Pembangunan yang belum terlaksanakan sesuai dengan RPJM Nagari. 4) Pemerintahan nagari belum memiliki website nagari sesuai dalam RPJM Nagari sehingga belum bisa profil nagari dan informasi nagari secara digital dan online. Hal ini mengaibatkan keterbatasan dalam mengakses informasi dari luar mengenai pemerintahan Nagari Parambahan. 5) Keberadaan Kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari Parambahan sesuai dengan RPJM Nagari sehingga belum mampu mewujudkan Nagari yang Mandiri. Berdasarkan informasi dari Pihak Pemerintah Nagari Parambahan, Pembangunan Jalan dari Nagari Parambahan ke Kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar sudah direncanakan dari awal berdirinya kampus ini. Tetapi sampai saat ini masyarakat Nagari Parambahan belum menikmati peningkatan dalam bidang ekonomi. Namun disisi lain, masyarakat Parambahan sangat beruntung, karena

di Nagari Parambahan sudah berdiri Perguruan Tinggi Islam Negeri yang dikenal dengan nama UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan hal ini tentu menjadi factor yang mendorong pembangunan di Nagari Parambahan ini. Lahan Masyarakat yang cukup luas telah menjadi tempat masyarakat menuntut ilmu. Seiring dengan pendirian Kampus ini, tentu ini menjadi lahan untuk perkembangan perekonomian, terutama masyarakat Nagari Parambahan itu sendiri. Tetapi disisi lain, hal ini masih jauh dari harapan, karena akses jalan dari Nagari Parambahan ke Kampus UIN masih tergolong minim. Hal ini yang menyebabkan Nagari Parambahan belum mampu untuk memberdayakan lahan sebagai sumber perekonomian masyarakat Nagari. Padahal kampus tersebut berdiri diatas lahan Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum kabupaten Tanah Datar. 6) Secara umum Pemerintah Nagari Parambahan sudah banyak melakukan pembangunan sesuai dengan RPJM Nagari seperti di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat, namun kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi belum tercapai sepenuhnya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Nagari Parambahan di masa yang akan datang, yakni Nagari yang mandiri.

Dari survey awal yang peneliti lakukan diatas, pokok permasalahan dalam

penelitian ini ialah Pemerintah Nagari Parambahan sudah banyak melakukan pembangunan sesuai dengan RPJM Nagari. Namun kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi belum tercapai sepenuhnya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Nagari Parambahan, yakni Nagari yang mandiri. Oleh karena itu, penelitian mengenai akuntabilitas pelaporan pembangunan nagari sangat menarik untuk dikaji.

Penelitian mengenai akuntabilitas telah banyak dilakukan orang. Sejauh ini penelitian mengenai akuntabilitas telah diteliti sebanyak tiga puluh satu. Penelitian mengenai akuntabilitas dibagi menjadi empat perspektif. Pertama, perspektif akuntansi keuangan (Agustiana, 2020), (Novita & Silviana, 2024), (Irfansyah et al., 2023), (Ismail et al., 2023), (Ardiany et al., 2023), (Garung & Ga, 2020), (D. S. Purba et al., 2023), (Nasution et al., 2024), (U. H. B. Purba & Nurlaila, 2024), (Tahir et al., 2020), (Ramadanis & Ahyaruddin, 2019), (Safitri & Retnosari, 2023), (Rachmawati & Indudewi, 2024), (Jaa & Supami Wahyu Sulistyowati, 2020), (Dewi & Sapari, 2020), (Mubarak, 2022), (N. A. Sari et al., 2022), (Hendrawati & Pramudiana, 2020), (Azizah & Andayani, 2022), (Hasanah & Yanto, 2021), (V. K. Sari & Widyawati, 2021), (Mais & Paliandri, 2020), (Mahardika et al., 2022) dan (Ana & Ga, 2021). Kedua, perspektif sistem informasi akuntansi (Mardaw et al.,

2022), (Asoka & Romanda, 2023). Ketiga, perspektif hukum (Goo & Sanda, 2022) dan (Fauzanto, 2020). Keempat, perspektif manajemen (Kabib et al., 2021), (Sofyani & Tahar, 2021). Sejauh ini penelitian perspektif akuntansi keuangan dengan akuntabilitas pelaporan pembangunan nagari dengan studi kasusnya di Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar, yang dinilai dengan enam indikator Permendagri No 114 Tahun 2014 belum pernah dilakukan penelitian.

Penelitian ini fokus pada pelaksanaan akuntabilitas laporan pembangunan nagari di Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini hendak mengkaji pelaksanaan akuntabilitas pelaporan pembangunan Nagari Parambahan tahun 2018-2023 telah sesuai atau belum dengan indikator Permendagri No 114 Tahun 2014. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pelaporan pembangunan Nagari Parambahan tahun 2018-2023.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai pelaksanaan akuntabilitas laporan pembangunan tahun 2018-2023 telah sesuai atau belum dengan Permendagri No 114 Tahun 2014. Penelitian ini akan dibahas dengan indikator akuntabilitas Permendagri No 114 Tahun 2014. Oleh karena itu, peneliti akan menulis artikel jurnal dengan judul Analisis Akuntabilitas

Pelaporan Pembangunan Tahun 2018-2023 Nagari Parambahan Kab. Tanah Datar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan wawancara dengan empat informan yang terdiri dari H. Robbi Yasdi selaku Wali Nagari Parambahan, Deni Eriani selaku Sekretaris Nagari Parambahan, Rinaldo Agesi selaku Kepa Jorong Tiga Batur, serta Afrida selaku masyarakat. Kemudian data dikumpulkan dengan dokumentasi. Data dokumentasi disini ialah program pengembangan Nagari sebagaimana diuraikan dalam RPJM, serta laporan akuntabilitas atau laporan realisasi pembangunan nagari tahun 2018-2023, serta data APB Nagari tahun 2022. Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles And Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan data. Reduksi data disini ialah data pelaksanaan akuntabilitas

pelaporan pembangunan Nagari Parambahan tahun 2018-2023. Data ini diambil yang penting-pentingnya saja, kemudian data lalu disajikan, dan dibahas dengan indikator akuntabilitas Permendagri No 114 Tahun 2014. Terakhir, baru penarikan kesimpulan setelah hasil penelitian disajikan, dan dibahas dengan indikator akuntabilitas Permendagri No 114 Tahun 2014.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Akuntabilitas Pelaporan Pembangunan Nagari Parambahan Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan akuntabilitas Pembangunan Nagari Parambahan, Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah memulai dengan membuat Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) . Rancangan ini dibuat maksimal disusun paling lambat 3 bulan setelah pelantikan Wali Nagari. Ada 5 Bidang Utama yang terdapat pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari seperti table berikut ini :

Tabel 1. Daftar Bidang/Jenis Kegiatan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar

No	Bidang/jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
I	Penyelenggaraan Pemerintahan	V	V	V	V	V	V	ADN

II	Nagari Pembangunan Nagari	V	V	V	V	V	V	APBD/APBN/DAK/ ADD
III	Pembinaan Kemasyarakatan	V	V	V	V	V	V	APBN/ADN
IV	Pemberdayaan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	APBN/ADN

(Sumber : Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari Parambahan Tahun 2018 s. d 2023)

Sesuai dengan tabel diatas diperoleh informasi bahwa masing-masing bidang / jenis kegiatan selalu disusun/direvisi setiap tahun, mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Mulai dari bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Waktu pelaksanaan kegiatan selama 6 tahun dengan sumber dana yang berbeda-beda. Sumber pendapatan Nagari Parambahan diperoleh dari Alokasi Dana Nagari (ADN), APBN dari Pusat berupa Alokasi Dana Desa (ADD), APBD dari Kabupaten/Kota berupa Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian, dilakukan wawancara dengan ibu Desiska Eriani selaku Sekretaris Nagari Parambahan. Wawancara ini untuk melihat realisasi (RPJM). Berikut adalah hasil wawancaranya.

“Selama ini RPJM tahun 2018-2023 di Nagari Parambahan belum 100% terealisasi. Penyebab ialah keterbatasan dana, dan

terjadinya Covid-19 dua tahun kemarin (Desiska Eriani, Sekretaris Nagari, 2023)”

Berdasarkan wawancara diatas, dijelaskan bahwa bidang/jenis kegiatan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2018-2023 di Nagari Parambahan tidak 100 % terealisasi. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana, dan terjadinya Covid – 19 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Akhirnya, kegiatan yang direncanakan pada tahun tersebut, banyak yang tidak dilaksanakan. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kembali dengan ibu Desiska Eriani selaku Sekretaris Nagari Parambahan.

Dijelaskan bahwa pelaksanaan program yang dananya direncanakan berasal dari APBN, tidak ada yang terealisasi. Penyebabnya karena tidak diterima bantuan pengajuan pembangunan pemerintah nagari tidak diterima oleh pemerintah pusat. Dimana untuk meminta bantuan pemerintah pusat diperlukan

kemampuan lobi personil nagari. Apalagi RPJM yang akan diajukan kepada pemerintah pusat membutuhkan dana yang besar. Contohnya pembangunan jalan tembus/inspeksi dari Parambahan ke kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar, sampai saat ini tidak terlaksana. Karena tidak tersedianya dana dari pusat. Selain itu kita

terkendala di lapangan seperti tidak adanya izin masyarakat untuk memberikan tanahnya dalam pembangunan jalan. Tidak terealisasinya pelaksanaan program yang dananya direncanakan berasal dari APBN didukung oleh data dokumentasi tabel. Berikut adalah data dokumentasi tabelnya.

**Tabel 2. Persentase Realisasi Pembangunan Tahun 2018-2023
Nagari Parambahan Kab. Tanah Datar**

No	Bidang/jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan biaya (Rp)	Sumber	Realisasi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari									
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	V	v	v	v	V	v	2.000.000.000	ADN	100%
2.	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	V	v	v	v	V	V	1.000.000.000	ADN	100%
3.	Penyusunan data Nagari	V	v	v	v	V	V	30.000.000	ADN	100%
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Nagari	V	v	v	v	V	V	60.000.000	ADN	100%
5.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	V	v	v	v	V	V	150.000.000	ADN	100%

	an (r)								
6.	Pembangun an /rehab sedang/beres t sarana dar prasarana kantor Nagari (Konstruksi)	v	v	v	v	V	V	360.000.000	ADN 100%
7.	Pengelolaar Informasi Nagari	v	v	v	v	V	V	100.000.000	ADN 100%
8.	Penyelenggaraan Perencanaa n Nagari (RPJM)	v	-	-	v	-	-	50.000.000	ADN 100%
9.	Operasional BPRN	v	v	v	v	V	V	100.800.000	ADN 100%
10.	Penyusunar Laporan Keterangan Pertanggung gjawaban dan Laporar Penyelenggaraan Pemerintah an Nagari	v	v	v	v	V	V	40.000.000	ADN 100%
11.	Penyelenggaraan Penyusunar RKP Nagari	v	v	v	v	V	V	60.000.000	ADN 100%
12.	Peningkatar Pelayanan Publik Dalam bidang kependuduk an	v	V	v	V	V	V	50.000.000	ADN 100%
13.	Intensifikasi Pemunguta n Penerimaan Daerah dan Penerimaan Nagari	v	V	v	V	V	V	70.000.000	ADN 100%
14.	Pengadaan Hotspot, Tower dan	v	V	-	-	V	-	100.000.000	ADN 0%

15.	Website Nagari Pengadaan Pustaka Nagari	v	V	v	V	V	V	120.000.000	ADN	0%
II Pembangunan Nagari										
1.	Pembuatan gerbang Batas Nagari Parambaha n	v	V	v	V	V	V	600.000.000	APBN	0%
2.	Rehab Mushalla nurul Hidayah dar tempat wudhuk	v	V	v	V	V	V	250.000.000	APBD	100%
3.	Pembangun an jalan tembus/insp eksi dari Parambaha n ke Kampus 2 IAIN Batusangka	v	V	v	V	V	V	1.500.000.000	APBN	0%
III Pembinaan Kemasyarakatan										
1.	Pembinaan Lembaga adat (KAN)	v	V	V	V	V	V	80.000.000	ADN	100%
2.	Pengadaan Pustaka Mesjid dan Mushalla	V	V	v	V	V	V	250.000.000	ADN	0%
3	Pelatihan Imam, Khatib, Da'i/ Mubaligh ,Tahfizd, Sholat khusuk serta penyelengg araan jenazah	V	V	v	V	V	V	120.000.000	ADN	50%
4	Pelaksanaa n Pacu Jawi	V	V	v	V	V	V	25.000.000	ADN	100%
IV Pemberdayaan Masyarakat										
1.	Perbaikan Pembangun an Rumah Tak Layak Huni bagi KK Miskin	V	V	v	V	V	V	600.000.000	ADN	75%

2.	Pengadaan bibit untuk masyarakat dalam mengatasi lahan tidur	V	V	v	V	V	V	200.000000	ADN	0%
----	--	---	---	---	---	---	---	------------	-----	----

Berdasarkan tabel 2 diatas, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Nagari Parambahan menggunakan dana ADN yang terbagi atas lima belas indikator dapat terealisasi 100% berjumlah tiga belas indikator, serta dua indikator sama sekali tidak terealisasi. Selanjutnya, tabel 1 menjelaskan bahwa pembangunan nagari menggunakan dana APBN dan APBD yang terbagi atas tiga indikator. Dari tiga indikator tersebut hanya satu indikator yang terealisasi 100% dengan menggunakan dana APBD. Sedangkan dua indikator yang menggunakan dana APBN sama sekali tidak terealisasi. Indikator yang menggunakan dana APBN yang tidak terealisasi itu ialah pembuatan gerbang batas Nagari Parambahan dan pembangunan jalan menuju kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Selanjutnya, tabel 1 menjelaskan bahwa pembinaan masyarakat dengan menggunakan dana ADN yang terbagi atas empat indikator. Dimana dua indikator dapat terealisasi 100%, dan satu indikator

terealisasi 50%, serta satu indikator sama sekali tidak terealisasi. Terakhir, tabel 1 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang terbagi atas dua indikator. Dimana satu indikator terealisasi 75%, dan satu indikator sama sekali tidak terealisasi. Kemudian, melakukan wawancara kembali dengan bapak H. Robi Yasdi selaku Wali Nagari Parambahan sebagai penguat. Dimana wawancara ini mengenai pembangunan nagari untuk jalan menuju kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

dijelaskan bahwa Pemerintah Nagari Parambahan melalui RPJM nagari telah berencana memprioritaskan kemajuan nagari. Dimana dengan cara memanfaatkan eksistensi kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang berada di Nagari Parambahan. Wali Nagari Parambahan menyebutkan akan sangat antusias, jika dapat membangun jalan menuju kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Dimana Wali Nagari berharap dengan pembangunan jalan ini dapat

membangkitkan ekonomi masyarakat dengan berwirausaha rumah kos dan ruko. Wirausaha rumah kos dan ruko akan menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat masing-masing Jorong yang berada di Nagari Parambahan. Namun, RPJM nagari yang direncanakan untuk pembangunan jalan menuju kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar dananya berasal dari pemerintah pusat. Dana dari pemerintah pusat ini tidak keluar. Akhirnya, pembangunan jalan menuju kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar dialihkan menggunakan alokasi dana desa (ADD). Dimana pembangunan jalan menuju kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar menggunakan alokasi dana desa (ADD) dilakukan secara bertahap, dan sampai hari belum siap. Kemudian, dilakukan wawancara kembali dengan Bapak Rinaldo Agasi selaku Wali Jorong sebagai penguat.

Dijelaskan bahwa kegiatan mengenai pembangunan desa menggunakan dana yang berasal dari alokasi dana desa (ADD). Dengan melihat dana ADD yang lebih banyak digunakan untuk membangun desa. Untuk itu diperlukan informasi seberapa besar APB Nagari

Parambahan. Untuk itu data mengenai informasi APB Nagari Parambahan diperoleh melalui tabel. Berikut adalah informasi APB Nagari Parambahan tahun 2022 saja.

Berikut Sumber Pendapatan Nagari Parambahan Tahun 2022 :

Pendapatan : 1.570.290.000

Pendapatan Asli Daerah : -

Dana Nagari Dari APBN

: 716.639.000

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Distribusi : 38.653.000

Alokasi Dana Nagari

: 814.998.000

Berdasarkan tabel data, diperoleh informasi pendapatan Nagari Parambahan tahun 2022 ialah satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah. Pendapatan asli daerah nol rupiah. Dana nagari dari APBN tujuh ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah. Dana hasil pajak daerah dan retribusi tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah. Setelah memperoleh informasi dana APB Nagari Parambahan tahun 2022. Wawancara kembali dilakukan untuk memperoleh informasi adakah penyampaian berkala laporan pada Bupati Tanah Datar.

Nagari Parambahan selalu tepat waktu menyampaikan realisasi RPJM dan APB Nagari Parambahan. Kemudian, dilakukan wawancara dengan ibu Desiska Eriani, Sekretaris Nagari Parambahan sebagai penguat.

Nagari Parambahan selalu tepat waktu menyampaikan realisasi RPJM dan APB Nagari Parambahan. Kemudian, dilakukan wawancara kembali dengan H. Robi Yasdi Wali Nagari Parambahan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai audit dan evaluasi laporan realisasi RPJM dan APB Nagari dilakukan atau tidak oleh Nagari Parambahan.

Nagari Parambahan selalu dilakukan evaluasi segala kegiatan yang menjadi program kerjanya oleh tim kecamatan, serta juga selalu di audit tim Inpketorat Kabupaten Tanah Datar mengenai realisasi RPJM serta APB Nagari. Kemudian, dengan ibu Desiska Eriani, Sekretaris Nagari Parambahan sebagai penguat.

Nagari Parambahan selalu dilakukan evaluasi segala kegiatan yang menjadi program kerjanya oleh tim kecamatan, serta juga selalu di audit tim Inspketorat Kabupaten Tanah Datar mengenai realisasi

RPJM serta APB Nagari. Kemudian, dilakukan wawancara kembali dengan H. Robi Yasdi Wali Nagari Parambahan mengenai transparansi dan partisipasi masyarakat.

Transparansi masih manual dibuktikan dengan pendirian baliho di halaman Wali Nagari Parambahan. Baliho ini menginformasikan kepada masyarakat laporan realisasi penggunaan anggaran atas program kerja selama setahun. Kemudian, dengan ibu Desiska Eriani, Sekretaris Nagari Parambahan sebagai penguat.

transparansi dibuktikan dengan pendirian baliho di halaman Wali Nagari Parambahan. Baliho ini menginformasikan kepada masyarakat laporan realisasi penggunaan anggaran atas program kerja selama setahun. Dengan data wawancara dan dokumentasi tabel diatas diperoleh hasil penelitian. Hasil penelitian ini ialah RPJM Nagari Parambahan belum 100% terealisasi karena adanya keterbatasan dana dengan tidak cairnya dana pemerintah pusat, serta terjadinya Covid-19. Dana yang banyak digunakan untuk pembangunan Nagari Parambahan ialah dana Alokasi Dana Nagari

(ADN), setelah itu baru dana APBD. Pemerintah Nagari Parambahan selalu tepat waktu menyampaikan realisasi RPJM dan APB Nagari Parambahan. Tim kecamatan selalu melakukan evaluasi atas segala kegiatan yang menjadi program kerjanya, serta juga selalu di audit oleh tim Inpketorat Kabupaten Tanah Datar mengenai realisasi RPJM serta APB Nagari. Pemerintah Nagari Parambahan transparansi masih dilakukan manual dengan dibuktikan pendirian baliho di halaman Wali Nagari Parambahan sebagai informasi kepada masyarakat atas laporan realisasi penggunaan anggaran atas program kerja selama setahun.

Berbicara mengenai akuntabilitas pelaporan pembangunan nagari. Akuntabilitas pelaporan pembangunan nagari sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah nagari secara periodik kepada Inspektorat Kabupaten atas program kerja yang mereka selesaikan dengan menggunakan anggaran yang direncanakan dalam RPJM. Dimana anggaran yang

direncanakan dalam RPJM dapat terealisasi 100% atau tidak (Arka et al., 2022). Untuk itu dibuatlah akuntabilita pelaporan pembangunan nagari. Akuntabilitas pelaporan pembangunan nagari telah diatur dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan RPJM Nagari menetapkan beberapa indikator akuntabilitas pelaporan RPJM Nagari. Berbicara mengenai indikator akuntabilitas pelaporan RPJM nagari. Dimana indikator RPJM nagari terdiri atas kesesuaian pelaporan, kelengkapan dokumen, kepatuhan prosedur, penyampaian berkala, audit dan evaluasi, serta transparansi dan partisipasi. Dengan melihat RPJM nagari ini, Nagari Parambahan akan dicoba diukur indikator akuntabilitas pembangunan nagari sesuai atau tidak dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 . Berikut adalah hasil penilaian indikator akuntabilitas pembangunan Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 3. Akuntabilitas Pelaporan Pembangunan menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014

No	Indikator		Keterangan
1	Kesesuaian Pelaporan	Laporan harus sesuai dengan RPJM yang disetujui, mencakup rencana	Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

		kegiatan, anggaran, dan hasil yang dicapai.	dari tahun 2018 sampai dengan 2023 masih ada yang tidak sesuai dengan Rancangan RPJM Nagari Parambahan. Hal ini menyebabkan terdapat ketidaksinkronan antara RPJM dengan Lapoaran Realisasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk karena Covid -19, namun perlu penyesuaian dan perubahan secara berkala dan nilai yang akuntabel, agar laporan yang disajikan secara wajar dan valid.
2	Kelengkapan Dokumen	Semua dokumen terkait pelaksanaan RPJM harus lengkap, meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan, dan bukti-bukti pendukung.	Pemerintah Nagari Parambahan sudah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen RPJM seperti laporan Keuangan, laporan kegiatan dan bukti pendukung.
3	Kepatuhan Prosedur	Pelaporan harus mematuhi prosedur dan format yang telah ditetapkan dalam peraturan.	Pelaporan RPJM dan RKP Nagari Parambahan sudah mematuhi format sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Peraturan Bupati Tanah Datar No. 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM dan RKP. Dimana RKP nya terdapat dalam lapran RPJM yang teralisasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari.
4	Penyampaian Berkala	Laporan harus disampaikan secara berkala kepada pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dan pemerintah.	Pemerintah Nagari Parambahan telah menyampaikan laporan berupa laporan APB Nagari dan laporan realisasi kegiatan dengan menggabungkan seluruh laporan secara berkala kepada pihak yang terkait seperti Bupati dan melalui

			Kecamatan paling lambat bulan Juli tahun berjalan
5	Audit dan Evaluasi	Laporan harus dapat diaudit dan dievaluasi oleh instansi yang berwenang untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi.	Audit dan Evaluasi selalu dilakukan oleh pendamping dari tim kecamatan dan audit oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.
6	Transparansi dan Partisipasi	Proses pelaporan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memastikan informasi dapat diakses publik.	Proses Pelaporan telah dilaksanakan dan dinformasikan ke public atau masyarakat berupa Baliho, namun Laporan tersebut sebatas Realisasi penggunaan Anggaran saja sedangkan untuk anggaran perencanaan kegiatan tidak ada dibuat atau di pajang pada baliho. Untuk informasi pelaporan belum melibatkan partisipasi masyarakat, dan diinformasikan kepada masyarakat masih manual, belum secara online menggunakan website.

Tabel hasil penilaian indikator akuntabilitas pembangunan Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar diatas, hanya empat indikator yang memenuhi dan sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014. Dimana keempat indikator yang memenuhi tersebut dan sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 terdiri atas kelengkapan dokumen, kepatuhan prosedur, penyampaian berkala, serta audit dan evaluasi. Sedangkan dua indikator tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun

2014 terdiri atas kesesuaian pelaporan, serta tranparansi dan partisipasi.

E. Kesimpulan

Hasil penelitian ini ialah RPJM Nagari Parambahan belum 100% terealisasi karena adanya keterbatasan dana dengan tidak cairnya dana pemerintah pusat, serta terjadinya Covid-19. Dana yang banyak digunakan untuk pembangunan Nagari Parambahan ialah dana Alokasi Dana Nagari (ADN), setelah itu baru dana APBD.

Pemerintah Nagari Parambahan selalu tepat waktu menyampaikan realisasi RPJM dan APB Nagari Parambahan. Tim kecamatan selalu melakukan evaluasi atas segala kegiatan yang menjadi program kerjanya, serta juga selalu di audit oleh tim Inspektorat Kabupaten Tanah Datar mengenai realisasi RPJM serta APB Nagari. Pemerintah Nagari Parambahan transparansi masih dilakukan manual dengan dibuktikan pendirian baliho di halaman Wali Nagari Parambahan sebagai informasi kepada masyarakat atas laporan realisasi penggunaan anggaran atas program kerja selama setahun. Setelah dibahas, hanya empat indikator yang memenuhi dan sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014. Dimana keempat indikator yang memenuhi tersebut dan sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 terdiri atas kelengkapan dokumen, kepatuhan prosedur, penyampaian berkala, serta audit dan evaluasi. Sedangkan dua indikator tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 terdiri atas kesesuaian pelaporan, serta transparansi dan partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada desa gunungbatu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol.1, 1–20. <https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/JMA/article/download/113/100>
- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Ardiany, D. D., Hayat, Rahmawati, S. D., & Rahmawati, S. D. (2023). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora*, 5(2), 79–90. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i2.991>
- Arka, G. P., Yentifa, A., & Sudiman, J. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 74–79. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.33>

- Asoka, R., & Romanda, C. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(1), 49. <https://doi.org/10.51877/jiar.v6i1.259>
- Azizah, W., & Andayani. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmi Riset Akuntansi*, 11(10), 1–15.
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Fauzanto, A. (2020). Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipatif. *Jurnal Hukum*, 3(1), 43–52.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, 1(1), 21–35.
- Hasanah, N., & Yanto, H. (2021). Efektivitas Pelatihan Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Dana Desa. *Business and Accounting Education Journal*, 2(2), 219–234. <https://doi.org/10.15294/baej.v2i2.50650>
- Hendrawati, E., & Pramudiana, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Irfansyah, A., Romanda, C., & Asoka, R. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(2), 236–254.
- Ismail, N., Marselina, A., & Weni, E. Y. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Mirai Management*, 8(3), 326–336.
- Jaa, E., & Supami Wahyu Sulistyowati. (2020). Pengaruh

- Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Turi Kabupaten Manggarai Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237>
- Kabib, N., Umar, A. U. A. Al, Fitriani, A., Lorenza, L., Lutfi, M. T., & Mustofa. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Sragen. *Jurnal Jiei*, 7(1), 341–349. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>
- Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Muhajirin. *Jurnal El Muhasaba*, 13(2), 136–147. <https://doi.org/10.32939/dhb.v4i1.1539>
- Mais, R. G., & Paliandri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Mardaw, M., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmiah Jurnal E-Jra*, 11(8), 39–46.
- Mubarak, M. (2022). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 200–210. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.11182>
- Nasution, A., Nurwani, & Syafina, L. (2024). Optimalisasi Akuntabilitas Dan Transparansi: Pendekatan Islam Pada Pedoman Asistensi Keuangan Desa Sikapas. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(2), 302–312. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i2.33059>
- Novita, N., & Silviana. (2024). Pengelolaan Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Kabupaten Bandung). *Jurnal Jrem*, 15(6), 69–85.
- Oktavia, N., & Desmiwerita. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 74–82. <https://doi.org/10.62194/dh7h5991>
- Purba, D. S., Tarigan, V., & Tarigan, W. J. (2023). Pemodelan Laporan Keuangan Gereja Menuju Transparansi Dan Akuntabilitas. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 5(2), 164–181.

- Purba, U. H. B., & Nurlaila, N. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Kelurahan Gundaling Il Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* Vol.3, 3(2), 105–118.
- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Jurnal Solusi*, 22(2), 187–196. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i2.8639>
- Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 110–118. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>
- Safitri, D., & Retnosari. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Selama Masa Pandemi Covid 19. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 693–703.
- Sari, N. A., Sopanah, A., & Anggrani, D. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah Di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.223>
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–16. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1(1), 20–29. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>